



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERIKANAN

***RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2024***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan” Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA)” Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu serta Target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang dilaksanakan melalui OPD Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, serta sebagai pedoman OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance*.

Terwujudnya *Good Governence* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan disusunnya Rancangan Perubahan RENJA ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini.

Putussibau, 15 November 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BAMBANG, S.E.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 199503 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	35
3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Renja PD.....	35
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36	36
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	36
BAB V. PENUTUP	48
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	48
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Daerah sesuai dengan kewenangannya, menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh perangkat daerah, yang dikoordinasi, disinergi dan diharmonisasi oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan di tingkat perangkat daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang menjadi pedoman peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan pemerintahannya dalam mewujudkan target RPJMD yang diselaraskan dengan target pembangunan nasional. Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dioptimalkan untuk mencapai target kinerja Renstra dan RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun RKPD, acuan utama yang digunakan adalah arah dan program Pembangunan Daerah seperti yang dijabarkan dalam dokumen RPJM Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan daerah setempat serta berbagai program prioritas pembangunan. Disamping itu, RKPD dalam penyusunannya juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Propinsi/Nasional. Dengan tujuan merujuk dokumen perencanaan pada tingkat di atasnya dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Pembangunan Perikanan secara umum merupakan bagian dari pembangunan Nasional, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Kapuas Hulu cukup besar dengan beraneka jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Perairan umum daratan

(PUD) atau yang lebih dikenal sebagai perairan pedalaman merupakan sumber daya perikanan yang sangat penting. Luas perairan umum daratan (PUD) Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 450.257 ha atau 3,27% dari luas perairan umum daratan (PUD) Indonesia (13,3 juta ha) yang terdiri dari danau dan sungai, dimana terdapat 115 danau dengan luas lebih dari 120.000 ha termasuk kawasan danau serta rawa Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan potensial dengan beragam jenis sumberdaya perikanan yang terkandung didalamnya dimana memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya terutama dari produksi ikan air tawar.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan diantaranya sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional:
 - a) Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
 - f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Landasan Operasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan acuan dalam menentukan pilihan-pilihan program kegiatan yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD serta segenap komponen dan lapisan masyarakat termasuk dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing SKPD bersipat sinergis dan koordinatif;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan selama periode satu tahun anggaran serta sebagai pedoman dalam menentukan arah, strategi maupun program prioritas kegiatan pembangunan baik sektoral maupun fungsional, secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Perikanan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
5. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

3.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaannya serta organisasi pelaksanaannya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 mendapatkan pagu anggaran senilai Rp. 15.365.341.177,- terealisasi sebesar Rp.12.732.620.466,- atau 82,87% dengan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5 Program, 18 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.

Tabel 1. Program, Kegiatan dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2022.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.365.341.177,00	12.732.620.466	82,87
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.365.400,00	8.364.400,00	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.900.000,00	2.899.700,00	99,99

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.780.000,00	2.780.000,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.087.100,00	145.947.100,00	99,90
b.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.375.525.987,00	3.354.359.175,00	99,37
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	344.340.000,00	343.590.000,00	99,78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.060.000,00	7.060.000,00	100,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.370.000,00	6.370.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11.860.000,00	11.860.000,00	100,00
c.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	39.402.000,00	39.396.500,00	99,99
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.513.500,00	14.440.800,00	99,50
d.	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.391.500,00	4.391.500,00	100,00
e.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	33.320.000,00	33.320.000,00	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.375.000,00	9.195.000,00	98,08
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.407.000,00	10.107.000,00	97,12
f.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	21.279.000,00	21.279.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
	Penyediaan Berang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	19.998.000,00	99,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.922.400,00	161.922.400,00	100,00
g.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.300.000,00	60.245.694,00	98,28
h.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.124.000,00	93.238.044,00	98,02
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.942.000,00	29.942.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.910.704.790,00	1.882.066.774,00	98,50
i.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.080.800,00	185.822.000,00	99,33
2.	PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN TANGKAP			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	%
a.	PENGLOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI,DANAU,WADUK,RAWA,DAN GENANGAN AIR LAINYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (Satu) DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	64.348.300,00	64.333.200,00	99,98
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	48.386.450,00	48.351.050,00	99,93
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.590.531.950,00	1.542.072.557,00	96,95
b.	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH /KABUPATEN KOTA			
	Pengembangan Kapasitas Nelayan kecil	30.985.700,00	30.911.650,00	99,76
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10.805.050,00	10.657.250,00	98,63
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,bantuan Pembiayaan,Kemitraan Usaha	10.496.650,00	10.495.000,00	99,98
c.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	59.792.000,00	59.331.000,00	99,23
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	57.711.150,00	57.526.725,00	99,68
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
a.	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL			
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.129.067.500,00	984.167.500,00	87,17
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	32.735.350,00	32.735.350,00	100,00
c.	PENGLOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN			
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.912.250,00	34.609.950,00	99,13
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.122.978.200,00	519.115.900,00	24,45
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.844.193.550,00	2.068.051.050,00	72,71
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.390.500,00	26.668.000,00	97,36
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	39.061.200,00	38.960.700,00	99,74
4.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
a.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawan dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota			
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai,danau,waduk,Rawan dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	24.406.350,00	24.405.900,00	100,00
	Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya di wilayah Sungai,danau,waduk,Rawan dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	25.546.400,00	25.535.350,00	99,96
5.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
a.	Pembinaan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.028.500,00	24.748.500,00	98,88

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	%
b.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	629.410.300,00	627.891.747,00	99,76
c.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten			
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.903.350,00	15.857.000,00	99,71
		15.365.341.177	12.732.620.466	82,87

Dari Tabel 1. Program, Kegiatan dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2022 menunjukkan bahwa realiasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan keseluruhan target anggaran sebesar Rp. 15.365.341.177,- terealisasi sebesar Rp. 12.732.620.466,- atau 82,87% dengan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5 Program, 18 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.

Tabel. 2
T- C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Angka capaian rata-rata dari evaluasi SAKIP indek kepuasan pelanggan dan masyarakat, evaluasi laporan keuangan			90	20	22,22	-	-	-	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	45	45,00	-	-	-	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana dan penetapan kinerja Dinas Perikanan			3	3	100,00	-	-	-	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan			1	1	100,00	-	-	-	
	c. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perikanan			1	1	100,00	-	-	-	
	d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Perubahan Dinas Perikanan			1	1	100,00	-	-	-	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP Dinas Perikanan			1	1	100,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi paket pekerjaan/pengadaan yang terpantau secara langsung (monev) dan pelaporan hasil monev			40	40	100,00	-	-	-	
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Perikanan			4	4	100,00	-	-	-	
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan pemakaian telpon, Internet, listrik dan air			100	100	100,00	-	-	-	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah honorarium tenaga pendukung yang tersedia dalam 1 tahun			100	100	100,00	-	-	-	
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Jumlah kontrak yang terealisasi dalam satu tahun			50	50	100,00	-	-	-	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1	1	100,00	-	-	-	
	d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase tanggapan pemeriksaan yang terpenuhi			100	100	100,00	-	-	-	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran yang tersusun			12	12	100,00	-	-	-	
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Aset BMD yang terdata dan dikelola			100	100	100,00	-	-	-	
	a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pengendalian BMD pada SKPD			70	70	100,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah KIB yang tercetak			1	1	100,00	-	-	-	
	4 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian			100	100	100,00	-	-	-	
	a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun			1	1	100,00	-	-	-	
	5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian			90	90	100,00	-	-	-	
	a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata bobot nilai perumusan ketersediaan yang dapat dicapai pada semua produk layanan publik			80	80	100,00	-	-	-	
	b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (PSTKP SKP) yang tersusun (Naskah)			37	37	100,00	-	-	-	
		Persentase capaian penyelenggaraan RB di Dinas			80	80	100,00	-	-	-	
	c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan			80	80	100,00	-	-	-	
	6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian			90	90	100,00	-	-	-	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan tiap bulan (rekening			12	12	100,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor dalam 1 tahun (bulan)			100	100	100,00	-	-	-	
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Kartu Ucapan Hari raya, Spanduk, Umbul-umbul dan biaya fotocopy dan penjiliditan yang disediakan			100	100	100,00	-	-	-	
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar, Tabloid dan majalah (Bulan)			100	100	100,00	-	-	-	
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti			10	10	100,00	-	-	-	
	7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peralatan yang diadakan			100	100	100,00	-	-	-	
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ragam jenis peralatan dan mesin yang disediakan			4	4	100,00	-	-	-	
	8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor yang disediakan			100	100	100,00	-	-	-	
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang dikirim			70	70	100,00	-	-	-	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase alat-alat listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi dalam 1 Tahun			100	100	100,00	-	-	-	
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kebutuhan OPD			100	100	100,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran (Orang)			100	100	100,00	-	-	-	
	9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			50	50	100,00	-	-	-	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase belanja operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional			100	100	100,00	-	-	-	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun			30	0	0,00	-	-	-	
	1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				7	0	0,00	-	-	-	
	a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data perikanan tangkap yang terfirvikasi			1	1	100,00	-	-	-	
	b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap pada perairan yang dikelola sistem CBF (dalam ton/tahun) dan atau Danau Lindung			7	0	0,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah ragam jenis sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia			7	7	100,00	-	-	-	
	2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Angka partisipasi nelayan pesisir pada wilayah ekosistem yang menjadi lokus pemberdayaan ekonomi			30,00	0,00	0,00	-	-	-	
	a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah ragam jenis sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia			7,00	0,00	0,00	-	-	-	
	b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang terfasilitasi			1,00	0,00	0,00	-	-	-	
	c. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan yang difasilitasi untuk mendapatkan Asuransi Nelayan			100,00	0,00	0,00	-	-	-	
	3 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Retribusi perikanan dalam jutaan			75.000.000	79.217.025	105,62	-	-	-	
	a. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah ikan yang di bongkar muat pada TPI per bulan dalam Ton			650,00	730,28	112,35	-	-	-	
		Tingkat kepuasan konsumen			B	B	100,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik			2	0	0,00	-	-	-	
	1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk			2	0	0,00	-	-	-	
	a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokmaswas yang terbina			2	0	0,00	-	-	-	
	b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau dan lainnya yang terawasi			10	0	0,00	-	-	-	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah benih yang diproduksi dalam ekor/tahun			600.377	640.088	106,61	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	1 Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah benih yang diproduksi (UPR/Pembudidaya) dalam ekor/tahun			100.000	100.000	100,00	-	-	-	
		Jumlah benih yang produksi dalam jenis/macam pertahun			3	3	100,00	-	-	-	
	a. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Presentase realisasi penyaluran bantuan yang dapat disalurkan dibandingkan target (%)			100.000	100.000	100,00	-	-	-	
		Jumlah produksi ikan di luar kawasan budidaya terpadu, Minapadi dan Kemitraan (Ton)			3	3	100,00	-	-	-	
	b. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Ragam jenis pelatihan budidaya air tawar			3	3	100,00	-	-	-	
		Jumlah orang pelatihan (orang)			15	36	240,00	-	-	-	
	2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya air tawar (kolam, keramba/KJA, Minapadi dan kawasan terpadu) (Ton)			25.000,00	25.000	100,00	-	-	-	
		Jumlah produksi benih ikan UPT BI (dalam ekor)			500.000,00	330.754	66,15	-	-	-	
	a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perikanan budidaya yang terfivikasi			2	2	100,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana kolam pembudidaya yang dibangun			15	15	100,00	-	-	-	
		Jumlah unit Kermaba Apung pembudidaya yang dibangun			20	20	100,00	-	-	-	
		Luas Budidaya Minapadi yang dibangun			2	2	100,00	-	-	-	
		Jumlah unit sarana UPT BI yang dibangun			8	0	0,00	-	-	-	
	c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih yang disediakan dalam ekor/tahun			20.000	0	0	-	-	-	
		Retribusi hasil penjualan benih (PAD) yang disetor			190.000.000	190.000.000	100,00	-	-	-	
	d. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah dan ragam jenis penyakit ikan pada usaha budidaya (kasus)			3	3	100,00	-	-	-	
	e. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Darat	Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina			10	10	100,00	-	-	-	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Pasokan Ikan (%)			5	5	100,00	-	-	-	
	1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi	Persentase pengolah yang terdata			10	10	100,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Usaha Skala Mikro Dan Kecil										
	a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data pengolah hasil perikanan yang terfivikasi			1	1	100,00	-	-	-	
	2 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolah yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro			2	0	0,00	-	-	-	
		Jumlah kelompok mikro yang berkembang dari kelompok mikro menjadi kelompok usaha kecil			5	0	0,00	-	-	-	
		Jumlah ragam/jenis produk di pasar tradisional (jenis)			5	5	100,00	-	-	-	
	a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah orang lulus terlatih pelatihan hasil pengolahan perikanan			-	-	0,00	-	-	-	
		Ragam jenis kompetensi/ keahlian yang dikuasai peserta lulus pelatihan			-	-	0,00	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan			10	10	100,00	-	-	-	
	a. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka capaian pembangunan sistem informasi pasokan ikan			3	3	100,00	-	-	-	
	b. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan bantuan			5	5	100,00	-	-	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perikanan yaitu Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Perikanan, Pengelolaan barang milik/Kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, penyampaian laporan secara periodik serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Tupoksinya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perikanan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi, Misi dan Tujuan Organisasi

VISI

“Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”

PENJABARAN VISI:

Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.

Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.

Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

MISI

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat.
 - a. Subbagian Umum dan Aparatur
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat**

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Reformasi Birokrasi			-	-	32,70	32,80	n/a	n/a	32,70	32,80	
2	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan			BB	BB	BB	BB	BB	0*	BB	BB	
3	Realisasi nilai bobot unsur-unsur pemenuhan formalitas dokumen yang dicapai			-	14,88	-	-	n/a	0*	n/a	n/a	
4	Realisasi nilai bobot unsur-unsur kualitas substansi instrumen akuntabilitas kinerja yang dicapai			-	29,03	-	-	n/a	0*	n/a	n/a	
5	Realisasi nilai bobot unsur-unsur penerapan /pemanfaatan instrumen yang dicapai			-	12,81	-	-	n/a	0*	n/a	n/a	
6	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi			-	14,78	-	-	n/a	0*	n/a	n/a	
7	Produksi ikan tangkap dalam ton per tahun			11.390	25.935	21.340	23.525	11.390	25.608	21.340	23.525	
8	Jumlah produksi budidaya (Ton)			32.266	27.852	25.356	25.608	32.266	35.543	25.356	25.608	
9	Jumlah Hasil produksi ikan olahan (Ton)			11.359	11.370	11.700	12.000	11.359	11.390	11.700	12.000	
10	Ragam Jenis Produk Olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)			-	5	5	-	n/a	5	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyusunan perencanaan kinerja serta strategis membutuhkan suatu gambaran tentang berbagai kondisi daerah. Informasi yang jelas tersebut akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan faktor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang atau tantangan.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor perikanan ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan, khususnya pada sektor perikanan.

Beberapa kendala dan hambatan serta permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tahun lalu, diantaranya yakni:

1) Perikanan Tangkap

- Maraknya Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yaitu menggunakan alat-alat tangkap yang merusak (*Destructive Fishing*);
- Penangkapan ikan yang berlebihan (*Over Fishing*);
- Kerusakan habitat Sumber Daya Ikan (SDI);

2) Perikanan Budidaya

- Ketersediaan benih baik secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung UPR;
- Kemampuan SDM Masyarakat pembudidaya masih terbatas;
- Terbatasnya akses permodalan;
- Luasnya wilayah binaan, beratnya medan lokasi budidaya;
- Teknologi anjuran belum diterapkan oleh semua pembudidaya;
- Rendahnya kontribusi UPR/Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas;
- Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan komunitas.

3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Kurangnya kelembagaan dan kapasitas SDM perikanan;
- Akses pasar masih terbatas;
- Pasokan bahan baku belum kontinyu;
- Belum optimalnya kualitas produk olahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.117.853.169						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100%	7.063.949.569						
			Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100%							
			Persentase pemenuhan data kepegawaian	100%							
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	87%							
			Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100%							
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%							
			Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%							
	Kegiatan :										

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	223.434.756						
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen							
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.429.676						
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.555.000						
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.555.000						
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.555.000						
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.780.000						
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	210.560.080						
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	3.811.231.649						
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.498.645.649						

5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	287.296.000						
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.060.000						
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6.370.000						
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	11.860.000						
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	73.653.000						
	Sub Kegiatan :										
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	68.339.000						
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.314.000						
	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000						
	Sub Kegiatan :										
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00						

	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Dokumen	71.078.800						
	Sub Kegiatan :										
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.264.000						
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.264.800						
	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perikanan	Jumlah aparatur yang mengikuti/Pendampingan kegiatan magang dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya	3 OK	35.550.000						
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen administrasi Umum	17 Dokumen	282.018.000						
	Sub Kegiatan :										
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.568.000						
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-						
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.475.000						
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.250.000						
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000						
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.171.000						

10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	15.154.000						
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	444.900.000						
	Sub Kegiatan :										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Paket	444.900.000						
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Dokumen	1.959.233.364						
	Sub Kegiatan :										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.996.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	121.440.000						
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.862.500						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.827.934.864						
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	188.400.000						
	Sub Kegiatan :										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	178.400.000						

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	10.000.000						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah produksi ikan pada wilayah sungai dan danau	26.899 Ton	1.265.053.800						
	Kegiatan :										
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah danau yang terbina	2 Danau	1.207.159.800						
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen	24.993.000						
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	-						
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 Paket	1.182.166.800						
	Kegiatan :										

	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah		Jumlah Kampung Nelayan yang terbina	-	-						
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-						
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	-						
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	-						
	Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Retribusi perikanan dalam jutaan	55.000.000	57.894.000						
	Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	36.794.000						
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	21.100.000						

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah produksi benih	1.200.000 Ekor	3.102.634.800						
			Jumlah produksi ikan konsumsi	23.553 Ton							
			Jumlah produksi ikan hias	58.000 Ekor							
			0	0							
			0	0							
	Kegiatan :										
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah pelaku usaha budidaya yang mengikuti pelatihan	10 Pembudidaya	1.612.431.800						
			Jumlah kemitraan yang dapat dikerjasamakan	1 Mitra							
	Sub Kegiatan :										
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-	-						
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	-	-						
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10 Kelompok	1.578.233.800						
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	34.198.000						
	Kegiatan :										
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya di kolam	6120 Ton	1.490.203.000						
			Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya di keramba	19.487 Ton							

			Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya di minapadi	1 Ton							
			Jumlah produksi benih ikan di UPT BI	440.000 Ekor							
			Jumlah produksi benih ikan di UPR	80.000 Ekor							
			Jumlah produksi benih ikan di pembudidaya mandiri	600.000 Ekor							
			Retribusi hasil penjualan benih (PAD) UPT BI yang disetor	Rp 210.000.000,00							
	Sub Kegiatan :										
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	34.997.000						
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 unit	680.724.000						
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Paket	774.482.000						
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	-	-						
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	-	-						
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Daratan yang terawasi	-	-						
	Kegiatan :										

	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Pulau Majang dan Vega	Jumlah Pokmaswas yang aktif dalam melakukan pengawasan	-	-						
	Sub Kegiatan :										
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota	-	-						
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	-						
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Angka konsumsi ikan	40 Kg/Kapita	686.215.000						
	Kegiatan :										
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Persentase pengolah yang terdata	15%	50.000.000						

	Sub Kegiatan :										
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	50.000.000						
	Kegiatan :										
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Poklhasar yang menerima bantuan	4 kelompok	626.215.000						
			Jumlah pelaku usaha yang sadar mutu	15 Pelaku							
			Jumlah ragam/jenis produk yang bermutu	3 Jenis							
	Sub Kegiatan :										
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit usaha	626.215.000						
	Kegiatan :										
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase ikan konsumsi yang tersedia di tingkat pengolahan dan konsumen	55%	10.000.000						
	Sub Kegiatan :										
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700 Ton	10.000.000						

	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	-						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam bentuk strategi pembangunan nasional yang kemudian terkait dengan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

Agenda/Nawa Cita ke-6:

Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

1. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
3. Penyempurnaan tata kelola perikanan; dan
4. Pengelolaan perikanan berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya pasokan ikan dan produk olahan di tingkat konsumen dan atau pasar dan unit pengolah (semua jenis komoditi dan produk olahan ikan);

Sedangkan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas;
2. Meningkatkan Produksi ikan tangkap;
3. Meningkatkan Produksi ikan budidaya;
4. Meningkatkan produksi ikan olahan dalam jumlah dan ragam jenis.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan Kinerja. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakat pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan sektor perikanan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel Berikut;

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aksi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aksi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			12.117.853.169				19.940.221.887	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat penilaian realisasi keuangan	100%	7.063.949.569			100%	7.100.826.288	
						Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100%				100%		
						Persentase pemenuhan data kepegawaian	100%				100%		
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	87%				85%		
						Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100%				100%		
						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%				100%		
						Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%				100%		
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	223.434.756	APBD II		22 Dokumen	236.600.000	

						Laporan Pelaksanaan Kegiatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
3	2 5	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	1 Dokumen	2.429.676	APBD II		8 Dokumen	52.800.000
3	2 5	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan	1 Dokumen	2.555.000	APBD II		2 Dokumen	6.800.000
3	2 5	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perikanan	1 Dokumen	2.555.000	APBD II		2 Dokumen	7.200.000
3	2 5	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	1 Dokumen	2.555.000	APBD II		2 Dokumen	7.800.000
3	2 5	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	1 Dokumen	2.780.000	APBD II		2 Dokumen	8.400.000
3	2 5	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	4 Laporan	210.560.080	APBD II		5 Dokumen	153.600.000
3	2 5	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Laporan	3.811.231.649			100%	4.129.221.988

3	2 5	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	30 Orang/Bulan	3.498.645.649	APBD II		37 Orang/Bulan	3.602.758.788
3	2 5	0 1	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perikanan	1 Dokumen	287.296.000	APBD II		1 Dokumen	491.489.000
3	2 5	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	1 Laporan	7.060.000	APBD II		1 Laporan	8.543.600
3	2 5	0 1	2.0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas Perikanan	1 Dokumen	6.370.000	APBD II		1 Dokumen	7.007.000
3	2 5	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perikanan	1 Laporan	11.860.000	APBD II		16 Laporan	19.423.600
3	2 5	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6 Dokumen	73.653.000			6 Dokumen	92.320.500
3	2 5	0 1	2.0 3	0 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perikanan	1 Laporan	68.339.000	APBD II		1 Laporan	85.000.000
3	2 5	0 1	2.0 3	0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perikanan	1 Laporan	5.314.000	APBD II		1 Laporan	7.320.500
3	2 5	0 1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	5.000.000

3	2	0	2.0	0	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perikanan	1 Dokumen	10.000.000	APBD II		1 Dokumen	5.000.000
3	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20 Dokumen	71.078.800			20 Dokumen	85.993.600
3	2	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perikanan	1 Dokumen	30.264.000	APBD II		1 Dokumen	22.993.600
3	2	0	2.0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perikanan	1 Dokumen	5.264.800	APBD II		1 Dokumen	63.000.000
3	2	0	2.0	0	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti/Pendampingan kegiatan magang dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya	Dinas Perikanan	3 OK	35.550.000	APBD II		4 OK	75.000.000
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi Umum		17 Dokumen	282.018.000			17 Dokumen	341.502.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan	1 Paket	6.568.000	APBD II		1 Paket	20.000.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan	1 Paket	-	APBD II		1 Paket	11.459.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perikanan	1 Paket	2.475.000	APBD II		1 Paket	10.551.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perikanan	1 Paket	5.250.000	APBD II		1 Paket	2.000.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Dinas Perikanan	1 Dokumen	2.400.000	APBD II		1 Dokumen	30.492.000

						Undangan yang Disediakan							
3	2	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	1 Laporan	250.171.000	APBD II		1 Laporan	242.000.000
3	2	0	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perikanan	1 Laporan	15.154.000	APBD II		1 Dokumen	25.000.000
3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Dokumen	444.900.000			2 Dokumen	122.028.500
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perikanan	5 Paket	444.900.000	APBD II		1Unit	122.028.500
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		75 Dokumen	1.959.233.364			75 Dokumen	1.924.677.700
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	1 Laporan	2.996.000	APBD II		1 Laporan	4.235.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perikanan	1 Laporan	121.440.000	APBD II		1 Laporan	165.286.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan	1 Laporan	6.862.500	APBD II		1 Laporan	22.429.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan	1 Laporan	1.827.934.864	APBD II		1 Laporan	1.732.727.700
3	2	0	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	188.400.000			3 Dokumen	163.482.000

3	2	0	2.1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perikanan	3 Unit	178.400.000	APBD II		3 Unit	153.482.000
3	2	0	2.1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perikanan	3 Unit	10.000.000	APBD II		3 Unit	10.000.000
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi ikan pada wilayah sungai dan danau		26.899 Ton	1.265.053.800			27301	1.699.000.000
3	2	0	2.0		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah danau yang terbina		2 Danau	1.207.159.800			2 Danau	1.102.000.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Kab.Kapuas Hulu	1 Dokumen	24.993.000	APBD II		1 Dokumen	287.000.000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab.Kapuas Hulu	-	-	APBD II		4Unit	265.000.000
3	2	0	2.0	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab.Kapuas Hulu	5 Paket	1.182.166.800	APBN/APBD II		4 Unit	550.000.000
3	2	0	2.0		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Nelayan yang terbina		-	-			5%	197.000.000
3	2	0	2.0	0	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab.Kapuas Hulu	-	-	APBD II		35 Orang	85.000.000

3	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab.Kapu as Hulu	-	-	APBD II		10 Kelompok	56.000.000
3	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab.Kapu as Hulu	-	-	APBD II		1 Unit Usaha	56.000.000
3	2	0	2.0		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Retribusi perikanan dalam jutaan		Rp 55.000.000	57.894.000	APBD II		Rp 95.000.000	400.000.000
3	2	0	2.0	0	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab.Kapu as Hulu	1 Dokumen	36.794.000	APBD II		0	-
3	2	0	2.0	0	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab.Kapu as Hulu	2 Layanan	21.100.000	APBD II		1 Dokumen	400.000.000
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi benih		1.200.000 Ekor	3.102.634.800			1.200.000 Ekor	9.780.395.599
						Jumlah produksi ikan konsumsi		23.553 Ton				14 Jenis	
						Jumlah produksi ikan hias		58.000 Ekor				162 Kg	
						0		0				23.553 Ton	
						0		0				58.000 Ekor	
3	2	0	2.0		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaku usaha budidaya yang mengikuti pelatihan		10 Pembudidaya	1.612.431.800			10 Pembudidaya	1.692.626.000
						Jumlah kemitraan yang dapat dikerjasamakan		1 Mitra				1 Mitra	
3	2	0	2.0	0	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD II		30 Kelompok	110.000.000

3	2 5	0 4	2.0 4	0 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	34.997.000	APBD II		2 Dokumen	50.000.000
3	2 5	0 4	2.0 4	0 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	20 unit	680.724.000	APBD II/APBN		20 unit	1.500.000.000
3	2 5	0 4	2.0 4	0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	4 Paket	774.482.000	APBD II/APBN		25 Unit	6.437.769.599
3	2 5	0 4	2.0 4	0 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD II		5 Dokumen	50.000.000
3	2 5	0 4	2.0 4	0 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD II		3 Orang	50.000.000
3	2 5	0 5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Daratan yang terawasi		-	-			20%	450.000.000
3	2 5	0 5	2.0 1		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Pokmaswas yang aktif dalam melakukan pengawasan		-	-			2 Pokmaswas	450.000.000
3	2 5	0 5	2.0 1	0 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Kab.Kapu as Hulu	-	-	APBD II		2 Dokumen	150.000.000

							dalam Kabupaten /Kota						
3	2 5	0 5	2.0 1	0 2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab.Kapuas Hulu	-	-	APBD II		2 Dokumen	300.000.000
3	2 5	0 6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				686.215.000				910.000.000
						Angka konsumsi ikan		40 Kg/Kapita				41,5 Kg/Kapita	
3	2 5	0 6	2.0 1		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolahan yang terdata		15%	50.000.000	APBD II		18%	280.000.000
3	2 5	0 6	2.0 1	0 1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	50.000.000	APBD II		1 Dokumen	280.000.000
3	2 5	0 6	2.0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan		4 kelompok	626.215.000	APBD II		6 kelompok	320.000.000
						Jumlah pelaku usaha yang sadar mutu		15 Pelaku		APBD II		20 Pelaku	

						Jumlah ragam/jenis produk yang bermutu		3 Jenis				4 Jenis	
3	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten Kapuas Hulu	20 Unit usaha	626.215.000	APBD II		20 Unit usaha	320.000.000
3	2	0	2.0		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ikan konsumsi yang tersedia di tingkat pengolah dan konsumen		55%	10.000.000	APBD II		65%	310.000.000
3	2	0	2.0	0	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	700 Ton	10.000.000	APBD II		850 Ton	270.000.000
3	2	0	2.0	0	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kabupaten Kapuas Hulu	2 Pelaku Usaha	-	APBD II		2 Pelaku Usaha	40.000.000

4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah, Dinas Perikanan tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini dapat memberi manfaat dalam pembangunan sektor Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik dan berkelanjutan.

Putussibau, 15 November 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BAMBANG, S.E.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 199503 1 005

